

EKSPLORASI MA PROGRAM KETERAMPILAN MENJADI MA KEJURUAN

Rohmat Mulyana

This article discloses the two sides of needs in eliciting information, i.e. first evaluating the continuance of skill programs at Madrasah Aliyah, and second, predicting the feasibility degree and the readiness of madrasahs and their administrators in facing the possibility of the change of status to a vocational school (MAK). This article also sheds light on the real condition of the administration of skill programs at Madrasah Aliyah in the last two years and the feasibility degree as well as the extent of their readiness when the present MAN is converted to vocational school.

A. Pendahuluan

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 18 ayat 3 secara eksplisit menyebutkan pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Suatu

kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan dalam undang-undang menjadi kewajiban bersama (pemerintah dan masyarakat) untuk mewujudkannya. Ketentuan undang-undang bukan suatu pilihan, melainkan kemestian yang harus direalisasikan. Oleh karenanya, permasalahan substantif yang muncul dari klausul tersebut menyangkut bagaimana dan kapan MAK dapat

diwujudkan sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan di lingkungan Departemen Agama.

Pemerintah setidaknya telah menyandarkan pentingnya MAK pada dua alasan. Alasan pertama, keterampilan kerja (*vocational skill*) menjadi pilihan yang paling realistis untuk membekali lulusan MA ketika mereka terjun di masyarakat dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Alasan ini bersifat praktis dan pragmatis. Sementara itu, alasan kedua berkenaan dengan telah adanya cikal bakal untuk pendirian MAK, yaitu program keterampilan yang dicangkakan pada sejumlah Madrasah Aliyah (MA). Alasan ini bersifat historis dan sebenarnya telah dipersiapkan jauh hari oleh pemerintah. Misalnya, hingga tahun 2001 terdapat 420 Madrasah Aliyah Program Keterampilan (MAN) yang tersebar di seluruh propinsi (Emis, 2001).

Celah antara pengalaman empirik dalam mengelola MAN dengan tuntutan normatif yang terdapat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi salah satu perhatian utama Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan sehingga studi eksploratif ini menjadi salah satu kegiatan penelitian. Penelitian eksploratif ini diharapkan dapat

mengungkap lebih jauh tentang kelemahan dan potensi-potensi MAN sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan madrasah kejuruan.

Masalah penelitian. Secara lebih terperinci masalah studi ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kondisi riil penyelenggaraan program keterampilan di Madrasah Aliyah dalam dua tahun terakhir?
- b. Bagaimanakah tingkat kelayakan MAN Program Keterampilan apabila dikonversi menjadi Madrasah Aliyah Kejuruan?
- e. Bagaimanakah tingkat kesiapan MAN Program Keterampilan apabila dikonversi menjadi MAK?
- d. Jika MAK harus dibangun di suatu tempat yang terpisah dari MAN Program Keterampilan, potensi apa yang dapat diandalkan dan dimanakah tempatnya?

Tujuan Studi. Secara umum studi ini ditujukan untuk menelaah tingkat kesiapan MAN Program Keterampilan untuk dijadikan Madrasah Aliyah Kejuruan. Disamping itu, penelitian ini memperluas cakupannya pada telaah kemungkinan dibukanya Jurusan Keterampilan di MAN dan kemungkinan didirikannya MAK.

Sifat dan Metode. Sifat studi ini ialah eksploratoris dengan mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Peneliti berada di lokasi selama 6 hari terus menerus untuk melakukan penelaahan secara komprehensif terhadap aspek aspek yang diteliti. Untuk itu, dikembangkan instrumen dan pedoman pelaksanaan pengumpulan data di lapangan.

Sasaran dan Lokasi Penelitian. Sasaran studi ini adalah MAN Program Keterampilan yang pernah dievaluasi oleh pihak Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2001 dan 2003. Pemilihan sasaran ini dimaksudkan agar analisis dinamika perkembangan program keterampilan memiliki sejumlah data pembandingan. Sementara itu, lokasi studi ditetapkan di 9 lokasi, meliputi kota Pontianak, Mataram, Padang, Palembang, Medan, Makasar, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Dari setiap kota dipilih satu MAN Program Keterampilan yang telah mengembangkan program pada fase I, II, atau III.

Responden dan alat Pengumpul Data. Responden studi ini adalah: (a) kepala MAN; (b) instruktur program keterampilan; (c) guru; (d) siswa; dan (e) mitra usaha. Sementara itu, alat pengumpul data yang digunakan dalam studi ini terdiri atas: (a) pedoman observasi, (b)

pedoman wawancara, dan (c) kuesioner.

Pengolahan Data. Pengolahan data untuk penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu: Pertama, untuk pengolahan data yang bersifat kualitatif pengolahan data dilakukan secara interpretatif dengan menggunakan model analisis SWOT. Kedua, untuk data yang sifatnya kuantitatif, pengolahan data dilakukan dengan cara analisis statistik sederhana seperti rata rata, persentase, nilai koefisien korelasi dan kategorisasi rentang nilai hasil konversi.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini mencoba mengungkap dua sisi kebutuhan dalam penggalian informasi, yaitu pertama melakukan evaluasi atas keberlangsungan program keterampilan di 9 Madrasah Aliyah. Kedua, memprediksi tingkat kelayakan dan kesiapan madrasah beserta penyelenggaranya dalam menghadapi kemungkinan adanya perubahan bentuk menjadi MAK. Dari hasil pengolahan data dan interpretasinya, beberapa temuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, pada dasarnya program keterampilan yang diselenggarakan di 9 MAN masih dapat bertahan meskipun dalam beberapa aspeknya

seperti fasilitas, alat-alat, dana, manajemen, enrollment, dan semangat pengelolaan cenderung semakin menurun dari tahun ke tahun.

Kedua, ada gejala umum yang dihadapi semua MAN sampel bahwa faktor biaya yang semula banyak disubsidi pemerintah melalui sejumlah program bantuan dan anggaran rutin kini kurang dapat diandalkan lagi. Karena itu, pihak MAN berupaya menutupi kebutuhan biaya ini dari orangtua siswa. Konsekuensinya, penyelenggaraan program keterampilan tidak lagi dapat sepenuhnya berorientasi pada siswa yang kurang mampu yang tidak akan melanjutkan ke jenjang PT, melainkan bagi siapa saja yang berminat dan mampu memberikan kontribusi keuangan untuk membantu keberlangsungan program.

Ketiga, kurikulum yang diajarkan hingga kini masih mengacu pada pedoman kurikulum yang disediakan oleh Ditjen Bagais Departemen Agama. Namun demikian, pencapaian jam pelajaran yang berjumlah 1080 jam pelajaran tampaknya sulit direalisasikan pihak penyelenggara karena kurikulum yang diajarkan di MAN cukup padat. Siswa program keterampilan acapkali merasa kelelahan dengan merangkap dua peran, yakni sebagai siswa MAN dalam kegiatan program

intrakurikuler sekaligus sebagai siswa peserta program keterampilan dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Keempat, terdapat hubungan yang signifikan antara profil umum MAN dengan kesungguhan pihak MAN dalam mengelola program keterampilan. Kualitas hubungan korelasional ini sebesar $r = 0,66$ dengan tingkat kepercayaan $p < 0,05$. Ini artinya, semakin baik pengelolaan MAN, maka semakin baik pula cara pengelolaan program keterampilan yang diselenggarakan dalam kegiatan ekstrakurikuler di MAN tersebut.

Kelima, dampak positif Program Keterampilan terhadap kinerja dan mutu MAN ternyata tidak begitu besar. Jika hal ini dikaitkan dengan poin 4 yang menjelaskan pengaruh profil umum MAN terhadap penyelenggaraan MAN, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa eksistensi program keterampilan berperan sebagai variabel yang dipengaruhi, bukan yang mempengaruhi. Artinya, hingga saat ini keberadaan Program Keterampilan belum dapat dikatakan sebagai daya tarik atau pusat keunggulan MAN yang mampu mempengaruhi kondisi umum MAN. Ada kesan bahwa penyelenggaraan Program Keterampilan di MAN lebih menambah kompleksitas pengelolaan MAN dan terjadinya subsidi silang dari anggaran MAN sehingga beberapa kebutuhan rutin

yang biasanya terpenuhi sebelum ada program keterampilan kini menjadi berkurang.

Keenam, dilihat dari faktor kelayakan untuk kebutuhan alih fungsi lembaga pendidikan MAN menjadi MAK, terdapat lima MAN yang memenuhi persyaratan minimal (nilai kelayakan minimal 60), yaitu MAN I Bukittinggi, MAN I dan MAN 2 Medan, MAN I Praya, MAN I dan MAN 2 Makasar, dan MAN 2 Pontianak. Kelima MAN ini memperoleh nilai kelayakan lebih dari 60. Dengan kata lain, jika pemerintah menghendaki untuk mengalihfungsikan MAN menjadi MAK kelima MAN ini dapat menjadi alternatif pertimbangan dibandingkan 4 MAN lainnya, yaitu MAN I Palembang, MAN 3 Yogyakarta, MAN I Jember dan MAN 2 Purwokerto. Tentu saja kemungkinan ini hanya dapat dilakukan dengan tidak mengabaikan aspek-aspek kesiapan psikologis kepala madrasah, guru, instruktur dan siswa MAN yang dipilih untuk alihfungsi. Sebab itu, meski dari sisi kelayakan dianggap memenuhi persyaratan masih diperlukan pertimbangan yang seksama berdasarkan aspek ini.

Ketujuh, dengan mempertimbangkan hasil analisis kualitatif dan kuantitatif sebenarnya ditemukan informasi bahwa tidak satupun MAN dari 9 MAN yang menyatakan

siap untuk dialihfungsikan. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan data-data kuantitatif, kepala MAN, guru, instruktur dan siswa pada umumnya menolak terjadinya alihfungsi MAN. Alasan alasan yang dikemukakan berkenaan dengan kesulitan yang akan dihadapi menyangkut perubahan manajemen pendidikan, pemenuhan guru dan instruktur, penambahan fasilitas dan alat alat, input siswa, dukungan dunia usaha, dan dukungan orangtua siswa. Jika kebijakan alihfungsi dilakukan di beberapa MAN ini, hal yang paling dikhawatirkan pihak penyelenggara adalah terjadinya masa transisi yang menyebabkan kerugian pada nasib guru mata pelajaran umum dan pada siswa yang tengah belajar pada masa transisi. Untuk mengatasi persoalan ini, kebijakan pengalihfungsian sebaiknya telah mempertimbangkan dampak dampak tersebut sehingga tetap memunculkan optimisme bagi penyelenggara pada saat kebijakan alih fungsi itu benar benar direalisasikan.

Kedelapan, pilihan paling aman menurut pengelola dan pengguna 9 MAN program keterampilan adalah dengan cara mendirikan Unit Gedung Baru (UGB) yang secara khusus diperuntukan bagi MAK. Untuk mendirikan unit gedung baru MAK ini pada umumnya pihak MAN mengusulkan MAK ber-

dampingan dengan MAN, agar fasilitas dan peralatan yang sudah ada dapat dimanfaatkan. Namun tentunya cara ini akan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Seperti yang berlaku dewasa ini, pembangunan 1 UGB untuk MAK sepadan dengan membangun 10 UGB untuk MA. Dalam arti kata, harapan penyelenggara akan sangat bergantung pada kesiapan finansial yang tersedia di Direktorat Mapenda.

Kesembilan, untuk pengembangan MAK juga diperoleh informasi bahwa jenis program keterampilan yang paling dibutuhkan oleh setiap daerah adalah jenis program keterampilan, tata busana.

Sementara itu, program lainnya dapat dijadikan alternatif pengembangan secara berturut-turut adalah keterampilan otomotif, elektro, komputer, kesekretariatan, pertanian, dan perhotelan. Dalam hal ini potensi daerah dan lapangan kerja yang tersedia menjadi pertimbangan utama dalam pembukaan jenis program pada MAK baru tersebut.

Terakhir, berdasarkan hasil analisis kualitatif dan kuantitatif juga diperoleh informasi tentang masalah strategis. Dengan menggunakan analisis SWOT masalah masalah tersebut dapat dipecahkan sebagai berikut:

Internal	Kekuatan: Ketersediaan Fasilitas dan alat program Keterampilan serta Lahan untuk UGB MAK	Kelemahan : Kekurang siapan Secara psikologis Penyelenggara dalam Menghadapi perubahan menuju MAK
Eksternal	Kesempatan : Adanya kesempatan daerah yang unik dan keterbukaan lapangan kerja di masa mendatang	Ancaman : Persaingan antar lembaga pendidikan kejuruan, terutama dengan SMK unggul
	Strategi Pemecahan 1	Strategi Pemecahan 2
	Strategi Pemecahan 3	Strategi Pemecahan 4

Strategi Pemecahan 1:

Fasilitas dan alat-alat program keterampilan yang sudah ada di madrasah aliyah dapat digunakan sebagai investasi awal untuk mendirikan MAK yang kemudian dapat diperluas sarana dan prasarannya sesuai dengan ketersediaan lahan, baik di sekitar MA maupun berlokasi jauh dari MA tersebut. Untuk I tahun awal pembuktian MAK yang menggunakan fasilitas MA program keterampilan dapat menginduk pengelolaannya pada MA tersebut. Dan, untuk mengantisipasi keunikan dari setiap daerah serta ketersediaan lapangan kerja, perlu dirintis jurusan baru yang benar-benar sesuai dengan potensi wilayah.

Strategi pemecahan 2:

Kelemahan yang terjadi akibat kekurangsiapan secara psikologis dari penyelenggara dalam menghadapi perubahan sesungguhnya dapat dikurangi oleh adanya kehendak kebijakan (*policy will*) yang secara terus menerus melakukan peningkatan secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Karenannya proses pengalihan profesi guru menjadi instruktur keterampilan dapat dilakukan secara bertahap dan pengangkatan instruktur keterampilan baru juga terus dilakukan. Arah pengembangan SDM instruktur ini tentunya berdasarkan pada jenis keterampilan

yang dikembangkan sesuai dengan potensi daerah. Dalam kondisi transisi, ketika MAK tersebut belum dapat memenuhi tenaga instruktur dari guru yang ada, pemerintah (dalam hal ini Departemen Agama) dapat menarik para instruktur kontrak ke MAK baru serta memperpanjang masa kontraknya.

Strategi Pemecahan 3 :

Sebaiknya pemerintah mendirikan dulu UGB baru untuk MAK sebagai model pada area yang telah disediakan pemerintah daerah sebagai pilot project dalam rangka mengantisipasi sejauh mana tingkat persaingan terjadi antara MAK dengan SMK. Rintisan ini sebaiknya dilakukan di daerah yang diprediksi memiliki tingkat kompetisi yang tinggi. Atau mungkin sebaliknya, pilot project dilakukan pada suatu daerah yang dianggap potensial untuk pengembangan MAK dan memiliki tingkat persaingan rendah karena belum tersedia sekolah menengah kejuruan di sana. Sebagai modal awal, alat-alat praktik dapat memanfaatkan yang ada di MAN program keterampilan ataupun melalui pengadaan barang-barang. Sisi lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menekankan keunikan kurikulum MAK yang bermuatan keahlian teknis plus kesadaran beragama.

Strategi Pemecahan 4 :

Kekurangsiapan secara psikologis dari pengelola MAN program keterampilan untuk menghadapi alihfungsi dapat dikurangi dengan tidak melakukan perubahan yang drastis akan kondisi MAN yang dialihfungsikan. Mungkin untuk tahap awal MAK hanyalah perubahan nomenklatur yang mengganti MAN. Perubahan ini secara berangsur dibenahi dengan meningkatkan kualitas guru menjadi in-

struktur serta melakukan kerjasama dengan SMK unggul yang paling dekat. Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk sharing SDM instruktur sebelum MAK itu benar-benar mandiri. Dengan cara ini, input siswa, proses belajar dan praktik, serta kebutuhan guru dan instruktur dapat berkolaborasi dengan SMK terdekat. Diharapkan dengan cara ini juga muncul persaingan yang kompetitif dan sehat.[]